

Keragaan Usaha Badan Kredit Kecamatan (Studi di Kalimantan Selatan)

A.O. Parluhutan Doloksaribu

Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fak.Pertanian,
Univ. Lambung Mangkurat

ABSTRACT

The study aims are: (1) knowing the efficiency of business of Badan Kredit Kecamatan (BKK), as well as the factors influence it; (2) to obtain the optimal picture of the income scale in each Badan Kredit Kecamatan; and (3) knowing the condition of Badan Kredit Kecamatan that measured by the liquidity ratio, solvency, and rentability, in the business district and the impact of the credit agencies on the technical efficiency. The primary data were collected from all (30) credit agencies in the 5 counties and secondary data collected from Bank Pendapatan Daerah. The technical efficiency was determined by the approach of deterministic production function frontier with the function of ray-homothetic whereas the financial analysis performed by the ratios. The results showed that all free variables were directly proportional and have real effect on the gross revenue of Badan Kredit Kecamatan. From the efficiency measuring, it was known that 93.33% of BKK have smaller efficiency index rather than the mean index of efficiency. About 76.67% of BKK were in a state of decreasing return to scale, which means that Badan Kredit Kecamatan in South of Kalimantan was not been efficient yet. That meant that the integration between input factor and technology used has not been reached the optimum, yet. The efficiency of Badan Kredit Kecamatan, significantly and positively, influenced by the state of liquidity and the number of business customer units that trained by the Badan Kredit Kecamatan, while solvability factors showed negative effect on the efficiency. With the condition of the BKK, it can be concluded that the BKK in South of Kalimantan is should to be increased.

Keywords: Technical efficiency, Liquidity, Solvency, Rentability.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Indonesia yang dinamis mendorong terciptanya pasar yang membawa

pedesaan kearah komersialisasi usaha dan pada akhirnya perekonomian pedesaan menjadi monetize. Keadaan ini memerlukan dukungan perbankan atau lembaga keuangan bukan bank yang

berperan memperlancar perekonomian melalui penyediaan kredit yang murah dan prosedur yang mudah.

Salah satu ciri khas pedesaan pada negara sedang berkembang (termasuk Indonesia) adalah kelangkaan modal untuk membiayai proses produksi, sehingga pendapatan dan taraf hidup masyarakat berkembang sangat lambat. Oleh karena itu modal mempunyai fungsi yang sangat mendasar bagi masyarakat desa untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan modal ini antara lain adalah belum mampunya lembaga formal di pedesaan untuk berperan secara efektif sebagai sumber kapital. Faktor lain yang memperburuk keadaan permodalan ini adalah tingginya *transactional cost* pada kredit formal dari pihak bank komersil, sehingga seringkali bunga yang harus dibayarkan secara riil sama dengan bunga kredit informal.

Untuk mengatasi kelangkaan modal di pedesaan ini pemerintah telah memperluas jaringan lembaga keuangan sampai pedesaan. Salah satu diantaranya yang sudah banyak dikenal adalah Bank Rakyat Indonesia-Unit Desa (BRI-UD). Namun demikian jangkauan lembaga ini belum meluas di seluruh wilayah pedesaan, karena penempatan BRI-UD sangat tergantung pada proyek yang dibiayai oleh BRI berada. Oleh karena itu lembaga keuangan formal yang berorientasi pedesaan (dalam arti bahwa

aktivitasnya disesuaikan dengan kondisi pedesaan) sangat diperlukan.

Pada beberapa tahun terakhir ini, lembaga keuangan formal seperti di atas telah mulai berkembang di berbagai daerah antara lain : Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di Jawa Barat; Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah dan di Kalimantan Selatan; Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur; Lumbung Pithi Nagari (LPN) di Sumatra Barat; dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LKPD) di Bali. Secara umum lembaga-lembaga ini juga disebut sebagai Lembaga Kredit Pedesaan (LKP) atau juga disebut Badan Kredit Pedesaan (BKP).

Kehadiran BKK di Kalimantan Selatan relatif masih baru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (Skpts) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan no: Eku-09/85, tanggal 20 Januari 1985. BKK berlokasi di wilayah kecamatan dengan lingkup operasinya adalah desa-desa di wilayah kecamatan tersebut.

Dalam pengelolaannya, BKK bersifat formal sebagaimana operasi bank komersil, walaupun belum semua aktivitas perbankan dapat dilakukan. Dari penelitian pendahuluan yang dilakukan nampak bahwa sampai dengan bulan Mei 1990 kegiatan BKK di Kalimantan Selatan hanya sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Demikian pula sumber modal hanya dari bantuan pemerintah tanpa adanya usaha

mobilisasi dana masyarakat. Dengan demikian sumber pendapatan BKK melulu hanya dari bunga kredit yang disalurkan. Oleh karena itu sebagai suatu unit produksi, perkembangan BKK sangat tergantung dari kemampuan mereka dalam mengelola dana yang telah dimilikinya. Hal ini berarti bahwa efisiensi dan efektivitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan BKK dalam melaksanakan aktivitasnya.

Sebagai suatu unit produksi, tentunya BKK mempunyai output yang diproses melalui input (masukan), dimana kegiatan tersebut akan terus berlangsung selama surplus dapat diciptakan lebih besar dari nilai masukannya. Selanjutnya BKK dengan sendirinya dapat meningkatkan kemampuan untuk mendorong sektor produknya agar lebih berkembang dengan memperhitungkan untung-rugi dengan kriteria ekonomi, sehingga untuk itu perlu dilakukan analisis efisiensinya.

Perumusan Masalah

Secara spesifik masalah efisiensi BKK di Kalimantan Selatan dapat dirumuskan : (1) apakah proses produksi yang dilakukan dalam pengelolaan kredit sudah efisien, (2) faktor-faktor apa yang mempengaruhi efisiensi yang menyangkut aspek kelembagaan itu sendiri, (3) bagaimana keragaan BKK terutama dalam likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dalam upaya peningkatan usaha

penyaluran kredit kepada masyarakat.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan Badan kredit Kecamatan (BKK) di Kalimantan Selatan, dan secara khusus adalah untuk :

1. Mengetahui efisiensi teknis usaha Badan Kredit Kecamatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Memperoleh gambaran tentang pendapatan skala optimal pada masing-masing Badan Kredit Kecamatan (BKK).
3. Mengetahui keragaan BKK yang diukur dengan ratio-ratio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dalam usaha BKK serta pengaruhnya terhadap efisiensi teknis.

Penelitian ini diharapkan berguna: (1) Bagi lembaga perkreditan, terutama BKK di Kalimantan Selatan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usaha untuk melakukan mobilisasi dana baik dari masyarakat maupun bank besar swasta; (2) Bagi pemerintah daerah, terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD) selaku pembina BKK dalam menetapkan kebijaksanaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan operasional BKK.

Tinjauan Pustaka

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan pada Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 dalam bab I, pasal 1,2 yang merumuskan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Menurut Abbott dan Makeham (1979), kredit bagi petani berarti tambahan modal yang pengembaliannya atau pembayarannya akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Dengan tersedianya tambahan modal maka petani dapat memperbesar skala usaha ekonomi sehingga output yang dihasilkan semakin besar dan biaya per unit semakin kecil (Kindleberger dan Herrick, 1984).

Selanjutnya Abbott dan Makeham (1979), menyatakan bahwa dalam aspek kredit ini terdapat dua sisi yang saling terkait satu sama lain dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai masing-masing. Disatu sisi seseorang yang memperoleh kredit berharap dapat meningkatkan output pada tingkat yang cukup untuk dapat membayar kembali pinjaman dan bunganya, serta dapat menutupi biaya hidupnya. Di pihak lain; pemberi pinjaman (kreditor) setuju meminjamkan

uangnya dengan keyakinan bahwa uangnya akan dibayar kembali dan memperoleh tambahan sebagai keuntungan. Oleh karena itu kelancaran kredit dan pembayarannya kembali adalah menggambarkan sejauh mana kepentingan kedua pihak tercapai serta masing-masing memenuhi kewajibannya.

Bagi pemerintah pemberi kredit dapat memberikan manfaat antara lain: (1) Sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu; (2) Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter; (3) Sebagai alat untuk menciptakan lapangan kerja atau lapangan usaha melalui peningkatan penyediaan faktor produksi; (4) Sebagai alat peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat; (5) Sebagai sumber pendapatan negara karena sebagian besar perkreditan di negara kita dikelola oleh bank-bank milik negara (6) Untuk menciptakan pasar, karena perkreditan akan memperbesar volume konsumsi yang akan memacu kegiatan pasar.

Kehadiran lembaga perantara keuangan dalam menyalurkan dana dari *surplus unit* ke *deficit unit* dirasakan semakin penting karena pertimbangan efisiensi (Hopkin, *et.al.*, 1973). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal ini diperlukan karena berbagai sumber dana mempunyai variasi dalam pemberian pinjaman baik jumlah maupun tingkat bunga.

Abbott dan Makeham (1979), menyatakan bahwa pada kebanyakan negara sedang berkembang memiliki berbagai sumber kredit untuk pedesaan, baik yang ditujukan pada sektor pertanian maupun sektor lainnya. Sumber-sumber kredit ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan: (a) Keluarga dan relasi, merupakan sumber kredit yang paling mudah dan cepat tetapi mereka tidak dapat menyediakan pinjaman sejumlah yang diperlukan dan pada waktu yang tepat; (b) Pelepas uang, yakni perorangan yang mencari cara yang menguntungkan dalam menggunakan *liquid capital* yang ada ditangannya kepada pihak lain secara langsung. Kelompok ini pada umumnya menempatkan keuntungan bunga sebagai tujuan utama sehingga tingkat bunga yang dikenakan sangat tinggi; (c) Bank komersial, dalam menyalurkan kredit menetapkan berbagai syarat sehingga relatif sulit dijangkau masyarakat pedesaan, dan pada umumnya bank ini tidak tertarik pada pengusaha berskala kecil dan petani; (d) Kopersi petani, pada umumnya tidak mempunyai modal dan kemampuan tenaga ahli untuk menangani perkreditan.

Mulyono (1989), menyatakan bahwa kredit mempunyai arti yang sangat penting bagi pihak perbankan terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini disebabkan volume permintaan dana lebih besar daripada penawaran yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pendapatan bunga dari kredit

merupakan komponen yang dominan dibandingkan dengan pendapatan bank dari jasa-jasa lainnya.

Agar bank dapat menciptakan suatu usaha perkreditan yang dapat menghasilkan surplus (laba) yang memadai, maka dana yang tersedia pada lembaga perkreditan harus dikelola dengan baik sehingga menjadi kredit yang produktif serta memiliki tingkat kolektibilitas yang tinggi.

Perkembangan usaha lembaga perkreditan dapat ditelaah dari kondisi keuangannya. Munawir (1986) menjelaskan ada tiga aspek yang dapat menjelaskan suatu kondisi perusahaan melalui laporan keuangan yakni laporan rugi-laba, neraca, dan laporan komplemennya.

Metode Penelitian

Daerah Penelitian dan Sumber data

Pemilihan daerah penelitian dilakukan dengan sengaja, yakni lima daerah kabupaten di Kalimantan Selatan yang telah memiliki Badan Kredit Kecamatan. Daerah-daerah tersebut adalah: Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Dengan demikian seluruh BKK yang ada diambil sebagai unit penelitian.

Data primer yang dikumpulkan berupa data yang diambil dari unit Badan Kredit Kecamatan. Data ini meliputi aspek yang berkaitan dengan keragaan antara lain : laporan keuangan berupa neraca, laporan rugi-laba, dan laporan komplemennya. Laporan komplemen meliputi: catatan tentang likuiditas, jumlah personal, tingkat bunga, volume kredit, jumlah dan perkembangan nasabah, kolektibilitas, struktur organisasi intern dan ekstern, pembinaan dari aparat pembina, partisipasi aparat setempat, uraian tugas dan informasi lainnya yang relevan dengan penelitian.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi yang berkaitan, antara lain Bank Pembangunan Daerah, Bappeda, dan lainnya yang sesuai dengan penelitian.

Penarikan Contoh

Penelitian meliputi seluruh BKK di Kalimantan Selatan yakni sebanyak 30 unit. Karena setiap unit BKK terdapat pada satu kecamatan maka mencakup sebanyak 30 buah kecamatan. Data yang diambil dari setiap BKK direncanakan data *time series* lima tahun yakni sejak tahun 1985 sampai dengan 1989. Dengan demikian jumlah unit pengamatan sebanyak 150 pengamatan.

Metode Analisis

Dalam studi ini digunakan analisis data dengan metoda pendugaan dan metoda deskriptif (analisis finansial).

Untuk menentukan efisiensi teknis pada BKK diduga melalui fungsi produksi *ray-homothetic* yaitu dengan pendekatan *deterministic statistical frontier* dan menggunakan *corrected ordinary least square* (COLS) yang digunakan dalam menentukan *frontier production* dengan bentuk fungsi berikut:

$$I(\lambda, x) = F(\lambda, H(x/*x*)) \cdot F^{-1}(I(x))$$

dimana:

x = menyatakan norma x,

$\lambda > 0$

F = kenaikan transformasi monotonik dari $(\lambda^{H(x/*x*)} \cdot F^{-1}(I(x)))$.

Jika F adalah fungsi identitas, maka fungsi produksi di atas menjadi :

$$I(\lambda, x) = \lambda^{H(x/*x*)} \cdot I(x)$$

dengan $H(x/*x*) > 0$

Penerimaan skala untuk nilai utama dari x diukur dengan fungsi skala, yang juga menunjukkan koefisien fungsi atau elastisitas dari output. Pada fungsi produksi *ray-homothetic*, persamaan skala ditunjukkan oleh penerimaan skala sebagai berikut:

$$u(x) = u(x/*x*) \cdot I(x)$$

Secara spesifik dalam persamaan matematis dapat ditulis dalam bentuk logaritma sebagai berikut :

$$YR_i = \ln \theta + a_{HP} HP' \ln HP + a_{BB} BB' \ln BB + a_{MK} MK' \ln MK +$$

$$a_{IN} IN' \ln IN + a_{BA} BA' \ln BA + a_{BP} BP' \ln BP + a_{JP} JP' \ln JP + a_{BL} BL' \ln BL$$

dimana :

- YR_i = Pendapatan kotor rata-rata per tahun
 HP = Honor dan upah pegawai rata-rata BKK per tahun
 BB = Biaya bunga yang dibayarkan BB rata-rata per tahun
 MK = Biaya pemeliharaan kendaraan BKK rata-rata per tahun
 IN = Insentif nasabah yang dibayar BKK rata-rata per tahun
 BA = Biaya administrasi yang dikeluarkan BKK rata-rata per tahun
 BP = Biaya perjalanan pegawai BKK rata-rata per tahun
 JP = Jasa produksi dan dana kesejahteraan yang dibayarkan BKK rata-rata per tahun
 BL = Biaya lain-lain yang dikeluarkan BKK rata-rata per tahun

Untuk mengeliminir terjadinya heterokedastik maka perlu dilakukan pembobotan (transformasi) terhadap peubah bebas dan peubah penjelas dengan mengalikannya dengan akar pangkat dua dari jumlah tahun pengamatan masing-masing BKK.

Indeks efisiensi teknis (TE_i) dihitung berdasarkan prosedur yang diberikan Timmer, 1979 dalam Russel and Young, 1983. Efisiensi teknis didefinisikan sebagai rasio antara pendapatan kotor nyata (Y) dengan pendapatan

kotor potensial (*frontier*) yaitu (Y') dimana nisbahnya adalah sebagai berikut :

$$e_i = Y - Y', i = 1, 2, 3, \dots, 30$$

$$TE_i = \exp. (e_i) = Y_i/Y_i' \leq 1$$

Untuk melihat sejauh mana beberapa faktor intern kelembagaan mempengaruhi efisiensi teknis, dilakukan analisis regresi berganda semi ln, yang secara matematis adalah :

$$\ln TE_i = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8$$

dimana :

- TE_i = Indeks efisiensi teknis masing-masing BKK
 X₁ = *Quick* rasio rata-rata masing-masing BKK
 X₂ = Umur masing-masing BKK dalam satuan bulan
 X₃ = *Primary* rasio rata-rata BKK
 X₄ = Persentase rata-rata unit usaha nasabah dapat dibina petugas BKK
 X₅ = *Net profit margin* rata-rata masing-masing BKK
 X₆ = Persentase tunggakan rata-rata BKK
 X₇ = Rasio nasabah pegawai BKK
 X₈ = Rasio nasabah penunggak dengan pegawai rata-rata BKK
 a = Intersept ;
 b₁, b₂, ..., b₈ = koefisien regresi

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran keragaan BKK selain efisiensi, skala ekonomi juga merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat

kondisi usaha BKK. Untuk menghitung pendapatan skala optimal pada masing-masing badan kredit kecamatan digunakan hasil regresi dari fungsi produksi *ray-homothetic* untuk menduga pendapatan kotor.

Jika μ melambangkan skala ekonomi, maka pendapatan kotor BKK pada skala optimum diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut :

$$\mu = \frac{a_{HP} HP'}{YR} + \frac{a_{BB} BB'}{YR} + \frac{a_{MK} MK'}{YR} + \frac{a_{IN} IN'}{YR} + \frac{a_{BA} BA'}{YR} + \frac{a_{BP} BP'}{YR} + \frac{a_{JP} JP'}{YR} + \frac{a_{BL} BL'}{YR}$$

Analisis pendapatan skala ini diawali dengan menghitung skala output. Skala output optimal (*constant return to scale*) dapat diperoleh dari persamaan di atas dengan mempersamakannya dengan satu, sehingga dapat ditulis:

$$Opt. YR = a_{HP} HP' + a_{BB} BB' + a_{MK} MK' + a_{IN} IN' + a_{BA} BA' + a_{BP} BP' + a_{JP} JP' + a_{BL} BL'$$

Seperti halnya dengan pendapatan kotor dugaan dari fungsi produksi *ray-homothetic*, skala optimal juga tergantung pada faktor intensitas penggunaan input. Dari

perhitungan didapatkan bahwa besarnya konstanta μ sangat bervariasi untuk semua BKK. Variasi besarnya μ menunjukkan bahwa sebanyak 23 BKK berada pada kondisi *increasing return to scale* dimana $\mu > 1$, dan sisanya 7 BKK berada pada kondisi *decreasing return to scale* dimana $\mu < 1$.

Untuk mengetahui keragaan BKK yang diukur dengan ratio-ratio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dalam usaha yang hubungannya terhadap efisiensi teknis pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif.

Tingkat solvabilitas dihitung dengan primary ratio, sedangkan untuk rentabilitas dihitung net profit margin dan return on total assets digambarkan oleh gross yield on total assets.

Hasil dan Pembahasan

Pendirian, Tujuan dan Lapangan usaha

BKK di Kalimantan Selatan didirikan dengan dasar surat keputusan Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Selatan nomor: Eku-09/85, tanggal 20 Januari 1985. Pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dati II yang termasuk dalam program pembangunan wilayah (PPW) Kalimantan Selatan, dapat didirikan sebuah lembaga perkreditan dengan nama Badan Kredit Kecamatan yang disingkat dengan BKK.

Sampai dengan akhir tahun 1990, telah didirikan sebanyak 30 unit BKK pada 30 Kecamatan di lima Kabupaten (Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai utara) yang merupakan lokasi dari program pengembangan wilayah.

Agar tujuan diatas dapat tercapai maka BKK menjalankan usaha-usaha: (1) penyaluran kredit usaha rakyat kecil (KURK) kepada masyarakat di pedesaan; dan (2) penerima simpanan atau tabungan dari masyarakat.

Usaha yang dapat dibiayai dengan KURK adalah masyarakat golongan ekonomi lemah yang produktif antara lain : pedagang kecil, pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan tangan dan industri kecil, yang beada pada wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Permodalan

Bagi BKK, modal dapat diperoleh dari beberapa sumber, sumber pertama adalah dari proyek program pengembangan wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) berupa pinjaman. Beberapa ketentuan mengenai pinjaman ini antarlain: (a) Besarnya modal kerja masing-masing BKK ditetapkan Gubernur berdasarkan penilaian BPD. (b) Jangka waktu pinjaman BKK maksimum 60 bulan, yang dapat diperpanjang kembali bila menurut pertimbangan masih memungkinkan. (c) Atas

pinjaman tersebut BKK wajib membayar bunga kepada BPD sebesar 0,5 persen per bulan dihitung dari sisa saldo pinjaman. (d) Hasil bunga tersebut ditampung dalam rekening pembinaan BKK, dan penggunaannya diatur oleh Gubernur kepala daerah.

Sumber modal lainnya adalah hasil keuntungan BKK dalam menyalurkan kredit yang ditampung dan dihimpun oleh BKK yang bersangkutan, serta dari pemanfaatan simpanan atau tabungan masyarakat, pinjaman-pinjaman, dan dana pernyataan pihak lainnya. Modal tersebut hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pemberian KURK dan harus dalam bentuk uang kepada masyarakat pedesaan.

Apabila BKK tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban dengan baik maka modal yang berasal dari pemerintah dapat ditarik kembali, tetapi bagi yang berprestasi baik akan diberikan hibah sebesar Rp 1.000.000,00.

Ketentuan Tentang Kredit

Batas maksimum kredit yang disalurkan dalam bentuk uang untuk setiap nasabah adalah Rp 200.000,00 yang diberikan secara bertahap sebagai peningkatan kredit sebelumnya. Kredit yang lebih besar dari plafon ini diarahkan menjadi nasabah BPD. Setiap calon nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan harus memperoleh pertimbangan dari kepala desa atau lurah sebelum diajukan ke BKK. Jangka

waktu pelunasan kredit dapat dilakukan dengan cicilan.

Dalam usaha kredit rakyat kecil ini tidak dikenal istilah bunga, melainkan biaya pengelolaan yang dibebankan kepada setiap peminjam. Besarnya biaya pengelolaan berkisar antara 3,78% dengan 3,81% per bulan atau jika dikonversi per tahun antara 45,36% sampai 45,72%.

Biaya pengelolaan ini dipergunakan untuk (1) Pembayaran bunga untuk BPD atau pihak lainnya, (2) Membayar honor dan insentif petugas BKK dan pelaksana lainnya, (3) Biaya administrasi dan lainnya.

Bagi nasabah yang telah membayar kewajibannya tepat pada waktunya, maka biaya pengelolaan akan dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan (insentif nasabah) sebesar 0,5% sebulan dari pokok pinjaman.

Laba setiap BKK dihitung berdasarkan neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh camat. Laba telah dikurangi pajak (laba bersih) dibagi menurut proporsi sebagai berikut: 1) Cadangan umum/modal (85%), 2) Jasa produksi (10%), dan 3) Dana kesejahteraan petugas BKK sebesar 5%.

Jasa produksi didistribusikan dengan ketentuan (a) sebesar 75% untuk petugas BKK (200), pemegang buku (150), pemegang kas (150), dan pembantu petugas (100), (b) sebesar 15% untuk camat dan (c) sebanyak 10% untuk

kepala desa/lurah yang terlibat dengan usaha BKK dan dikonversi berdasarkan jumlah nasabah dari desa yang bersangkutan.

Efisiensi teknis usaha Badan Kredit Kecamatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil pendugaan fungsi produksi adalah :

$$YR_i = -193740046,07 + 13430351,73 aHP + 15302981,33 aBB + 13320005,58 aMK + 15087996,47 aIN + 15859297,26 aBA + 16624309,07 aBP + 16689122,98 aJP + 16231802,99 aBL$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa semua peubah bebas yang digunakan berbanding lurus dan berpengaruh sangat nyata terhadap pendapatan kotor BKK. Pengaruh positif terbesar sampai terkecil berturut-turut : jasa produksi, biaya perjalanan, biaya lain-lain, biaya administrasi, insentif nasabah, honor dan upah pegawai dan biaya pemeliharaan kendaraan. Dengan demikian jasa produksi mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan BKK, yang berarti bahwa insentif pegawai BKK dalam bentuk jasa produksi sangat penting untuk diperhatikan. Selain itu, biaya perjalanan juga sangat dibutuhkan sebagai sarana untuk meningkatkan mobilitas pegawai BKK dalam melakukan aktivitas pengawasan kepada nasabah dan

penarikan kredit dari debitur yang sudah jatuh tempo.

Konsep efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep efisiensi teknis, yaitu teknologi yang digunakan suatu BKK dalam menjalankan semua aktivitasnya, dan suatu BKK dianggap lebih efisien dari BKK lainnya jika dalam menghasilkan penerimaan yang sama menggunakan biaya yang lebih kecil atau jika untuk pengeluaran yang sama dapat menghasilkan penerimaan yang lebih besar. Oleh karena itu pengertian efisiensi yang dimaksudkan adalah pengertian relatif.

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa indeks efisiensi teknis tertinggi terjadi pada BKK Karang Intan dan Gambut Kabupaten Banjar yaitu sebesar 1,0 sedangkan yang terendah terjadi pada BKK Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 0.4279. Hal ini berarti bahwa BKK di Kecamatan Karang Intan secara teknis lebih efisien dibandingkan dengan BKK di daerah lain karena dengan penggunaan input yang sama mampu memperoleh pendapatan kotor yang lebih besar. Demikian pula BKK di Kecamatan Sungai Pandan secara teknis relatif tidak efisien dibandingkan dengan BKK di daerah lain di Kalimantan Selatan.

Aspek lain yang penting untuk disimak bahwa ke- 30 BKK di Kalimantan Selatan mempunyai indeks efisiensi teknis yang bervariasi satu sama lain dimana

keadaan ini menggambarkan bahwa setiap BKK mempunyai derajat efisiensi teknis yang berbeda-beda. Jika indeks efisiensi teknis mengindikasikan kemampuan pengelolaan atau manajemen teknis perkreditan, maka dapat dikatakan bahwa BKK di Kalimantan Selatan mempunyai tingkat kemampuan manajemen yang berbeda-beda dalam menerapkan teknologi yang sudah ada dalam perkreditan. Keadaan tersebut pada akhirnya akan menunjukkan perbedaan dalam tingkat kemampuan menghasilkan output atau pendapatan kotor antara satu BKK dengan BKK yang lain.

Jika nilai tengah indeks efisiensi teknis digunakan sebagai ukuran batas efisiensi yaitu sebesar 0,7139 maka hanya 2 buah BKK saja yang memiliki indeks efisiensi teknis yang lebih besar dari angka tersebut. Selebihnya 28 BKK berada pada indeks efisiensi teknis lebih kecil dari 0,7139. Hal ini berarti bahwa sebagian besar BKK bekerja relatif kurang efisien secara teknis sehingga BKK di Kalimantan Selatan masih perlu memperbaiki manajemen teknisnya agar mampu mengejar BKK yang telah relatif lebih efisien.

Hasil pendugaan dari fungsi adalah sebagai berikut :

$$TE_i = -0,7764 + 0,1527^{**}X_1 + 0,000471 X_2 - 0,32^{**}X_3 + 0,0049^{**}X_4 + 0,0914 X_5 + 0,000392 X_6 - 0,00006 X_7 + 0,000001 X_8$$

Pada pendugaan di atas menunjukkan bahwa sebanyak enam peubah bebas menunjukkan hubungan yang berbanding lurus terhadap indeks efisiensi teknis masing-masing BKK dimana terdapat 2 variabel yang berpengaruh sangat nyata yaitu peubah *quick ratio* rata-rata BKK dan peubah persentase pengenalan dan pengawasan unit usaha nasabah rata-rata (checking on the spot) oleh petugas BKK.

Dari hubungan di atas sebagian besar menunjukkan hubungan yang positif dan hanya sebagian kecil saja yang negatif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi persentase unit usaha yang dapat dikenal dan diawasi petugas BKK dalam wilayah kerjanya maka efisiensi teknis yang dicapai BKK yang bersangkutan akan semakin tinggi. Pengenalan dan pengawasan sudah tentu dapat membawa dampak positif ganda baik bagi nasabah itu sendiri maupun bagi BKK. Bagi nasabah, pengawasan secara langsung dapat memberi petunjuk agar bantuan modal yang diperoleh dari BKK digunakan secara tepat dalam mendorong perkembangan usahanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya. Bagi BKK sendiri peningkatan pendapatan nasabah merupakan salah satu faktor pendorong agar nasabah mampu melunasi kreditnya pada saat jatuh tempo, sehingga dapat menekan biaya operasional BKK. Semakin banyak jumlah nasabah yang melunasi kreditnya maka biaya operasional BKK khususnya biaya perjalanan untuk penagihan kredit

akan dapat ditekan. Pada akhirnya biaya per satuan output atau pendapatan kotor akan semakin kecil sehingga efisiensi yang dicapai BKK akan semakin tinggi.

Gambaran Pendapatan Skala Optimal pada masing-masing Badan Kredit Kecamatan

Seperti halnya dengan pendapatan kotor dugaan dari fungsi produksi *ray-homothetic*, skala optimal juga tergantung pada faktor intensitas penggunaan input. Dari perhitungan didapatkan bahwa besarnya konstanta μ sangat bervariasi untuk semua BKK. Variasi besarnya μ menunjukkan bahwa sebanyak 23 BKK berada pada kondisi *increasing return to scale* dimana $\mu > 1$, dan sisanya 7 BKK berada pada kondisi *decreasing return to scale* dimana $\mu < 1$.

Keragaan BKK dan Pengaruhnya Terhadap Efisiensi Teknis

Untuk mengetahui keragaan BKK yang diukur dengan ratio-ratio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dalam usaha yang hubungannya terhadap efisiensi teknis pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif.

Tingkat solvabilitas dihitung dengan primary ratio, sedangkan untuk rentabilitas dihitung net profit margin dan return on total assets digambarkan oleh gross yield on total assets.

Pada keenam peubah bebas yang menunjukkan hubungan berbanding lurus tersebut terdapat dua peubah yang berpengaruh sangat nyata terhadap indeks efisiensi, yakni peubah *quick ratio* rata-rata BKK, dan peubah persentase pengenalan dan pengawasan unit usaha nasabah rata-rata (cheeking on the spot) oleh petugas BKK, sementara lima peubah lainnya tidak nyata. Dari dua peubah bebas yang berbanding terbalik ternyata hanya satu diantaranya yang berpengaruh sangat nyata yakni peubah *primary ratio* rata-rata BKK yang menggambarkan kondisi solvabilitas.

Dengan keadaan hubungan antara indeks efisiensi dengan peubah-peubah diatas dapat dikatakan sebagian besar menunjukkan hubungan yang negatif. Dari hubungan peubah yang positif dapat dijelaskan bahwa pengenalan dan pengawasan atas unit usaha nasabah yang dilakukan oleh petugas BKK berpengaruh positif terhadap peningkatan indeks efisiensi teknis. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi persentase unit usaha yang dapat dikenal dan diawasi petugas BKK dalam wilayah kerjanya maka efisiensi teknis yang dicapai BKK yang bersangkutan akan semakin tinggi. Pengenalan dan pengawasan unit usaha nasabah sudah tentu dapat membawa dampak positif ganda yakni bagi nasabah itu sendiri maupun bagi BKK. Bagi nasabah disatu pihak pengawasan secara langsung dapat memberi petunjuk agar bantuan modal yang diperoleh dari BKK digunakan secara tepat dalam

mendorong perkembangan usahanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya. Dipihak lain, peningkatan pendapatan nasabah merupakan salah satu faktor pendorong agar nasabah mampu melunasi kreditnya secepat mungkin, atau setidaknya dapat dilakukan sebelum atau pada saat jatuh tempo, sehingga dapat menekan biaya operasional BKK. Semakin banyak jumlah nasabah yang melunasi kreditnya sesuai dengan jadwal jatuh tempo maka biaya operasional BKK khususnya biaya perjalanan yang diperlukan untuk penagihan akan dapat ditekan. Pada akhirnya biaya per satuan output atau pendapatan kotor akan semakin kecil, sehingga efisiensi yang dicapai BKK akan semakin tinggi.

Gambaran yang akan diperlihatkan dari ratio-ratio tersebut adalah bahwa semakin baik tingkat likuiditas nampaknya dapat meningkatkan efisiensi. Khusus pada peubah *quick ratio* yang menggambarkan kemampuan BKK dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutangnya yaitu pokok dan bunga pinjamannya, merupakan aspek yang dapat memacu peningkatan efisiensi. Rangkaian yang mungkin terjadi dalam hubungan antara likuiditas dengan efisiensi ini dapat dimulai dari kewajiban BKK. Setiap BKK memperoleh pinjaman dari pemerintah sebagai modal awal dimana BKK berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya yang dapat dilakukan secara bertahap.

Kewajiban tersebut memacu BKK untuk meningkatkan pendapatan yang merupakan sumber pembiayaan pada berbagai aktivitas dan sebagai sumber dari cadangan modal, biaya operasi, terjadinya dan insentif petugas BKK. Agar insentif pegawai BKK dapat ditingkatkan maka efisiensi harus lebih tinggi dan pendapatan harus diusahakan semaksimal mungkin. Pendapatan yang tinggi ini merupakan uang kes yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya.

Peubah net profit margin yang menggambarkan rentabilitas BKK yakni sebagai ukuran kemampuan BKK dalam menghasilkan pendapatan bersih nampak berpengaruh positif terhadap indeks efisiensi teknis sampai pada tingkat nyata tertentu. Hal ini disebabkan net profit margin itu sendiri dapat menggambarkan kondisi kemampuan BKK dalam menekan biaya per satuan output atau pendapatan kotor BKK. Peubah primary ratio sebagai salah satu cara untuk melihat solvabilitas, ternyata berpengaruh negatif sangat nyata terhadap indeks efisiensi BKK. Hal ini berarti semakin besar penurunan atau penyusutan pada asset yang harus ditutupi oleh equity capital (penjumlahan dari modal, cadangan modal, cadangan modal ragu-ragu, sisa laba tahun yang lalu dan laba tahun berjalan) akan membawa pengaruh yang negatif terhadap efisiensi. Salah satu diantara faktor penyebab tersebut adalah terjadinya tunggakan pelunasan kredit oleh nasabah, dan terakumulasi dalam cadangan

modal ragu-ragu. Hal ini disebabkan belum diterapkannya sistem penghapusan tunggakan merah dalam pembukuan BKK. Tunggakan akan mengurangi kapital yang dapat disalurkan menjadi kredit pada nasabah sehingga pendapatan akan menurun, sementara biaya operasi BKK relatif tetap. Dengan demikian unit cost pada output atau pendapatan kotor BKK relatif naik sehingga efisiensi akan semakin menurun.

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Kesimpulan

Keberhasilan BKK ditunjukan beberapa fenomena antara lain: (a) BKK telah mulai mampu memenuhi sasaran pemerintah dalam menyalurkan kredit ke sektor pedesaan. (b) jumlah kredit yang disalurkan, dan nasabah BKK menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi dari tahun ke tahun, yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat desa yang terkait dengan lembaga keuangan sehingga pedesaan akan semakin *monetize*. (c) sebagai lembaga keuangan, BKK telah mampu mengembangkan asetnya, bahkan pada tahun terakhir ini lebih kurang 96% diantaranya telah mandiri, yang berarti mereka telah mampu membiayai seluruh kegiatan operasionalnya.

Beberapa kelemahan yang masih terjadi diperlihatkan oleh: (1) Tingkat tunggakan pelunasan kredit dari nasabah BKK relatif

sangat tinggi yakni rata-rata 18.68 persen per tahun. Disamping nasabah penunggak yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, keadaan ini diperburuk lagi oleh kenaikan kualitas tunggakan yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah tunggakan per nasabah (2) Pada umumnya BKK berada pada kondisi yang tidak efisien, yang ditunjukkan oleh indikator dimana 76,67 persen pada keadaan *increasing return to scale*. Selain itu sebagian BKK (93,33%) memiliki indeks efisiensi lebih kecil dari nilai tengah indeks efisiensi teknis. (3) ketidakefisienan ini mengakibatkan BKK tidak mampu meraih pendapatan potensiil dan pendapatan skala optimal. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan rata-rata BKK hanya sebesar Rp 6.056.114,33 per tahun, sedangkan pendapatan kotor potensiil rata-rata Rp 11.459.002,84, dan pendapatan kotor skala optimal Rp 14.670.522,41 rata-rata per tahun.

Disisi lain, inefisiensi merupakan kerugian relatif bagi masing-masing BKK, dimana ukurannya digambarkan oleh jumlah kehilangan pendapatannya. Jika dibandingkan antara pendapatan actual rata-rata dengan pendapatan potensiil rata-rata, maka setiap BKK mengalami kehilangan (revenue lost) sebesar Rp 5.402.888,50 dan terhadap rata-rata pendapatan skala optimal sebesar Rp 1.308.195,50 sehingga jumlah kehilangan pendapatan akibat inefisiensi sebesar Rp 6.711.083,69.

Faktor inefisiensi BKK sebagian besar (80,51%) disebabkan oleh ketidak efisienan teknis murni, dan hanya sebagian kecil (19,49%) oleh ketidak efisienan skala. Hal ini berarti ketidakmampuan teknis dalam pengelolaan BKK mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam ketidakefisienan ini, dibandingkan dengan ketidakmampuan dalam menangkap skala optimal.

Dari beberapa faktor yang diteliti nampak bahwa faktor kemampuan BKK untuk membayar hutang kewajibannya dengan alat yang paling likuid, dan pembinaan terhadap usaha nasabah mempunyai pengaruh positif nyata terhadap efisiensi. Di pihak lain kerugian yang terjadi dan harus ditanggung BKK sebagai akibat dari resiko penggunaan asset (primary ratio) menunjukkan pengaruh negatif nyata terhadap efisiensi.

Implikasi Kebijakan

Dalam upaya pengembangan dan pembinaan BKK yang sudah ada (existing) terdapat beberapa aspek yang sangat penting diperhatikan antara lain : (a) tingkat tunggakan pelunasan kredit yang cukup besar membawa dampak negatif terhadap kualitas *equity capital* dan kondisi solvabilitas BKK. Oleh karena itu tingkat tunggakan ini hendaknya dapat ditekan sampai serendah mungkin melalui pengawasan dan seleksi nasabah serta pembinaan usaha nasabah, agar kredit yang disalurkan benar-benar dipergunakan pada usaha yang produktif. (b) usaha

peningkatan efisiensi sangat perlu dilakukan untuk menciptakan BKK yang tangguh dalam arti memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri, dan yang mempunyai daya saing yang baik terhadap lembaga keuangan yang ada atau akan ada di pedesaan. Prioritas utama yang harus ditempuh dalam langkah ini adalah peningkatan kemampuan teknis pengelola dalam menerapkan aktivitas dan pelayanan jasa perbankan profesional, melalui pendidikan dan latihan serta pengawasan yang efektif dan efisien. (c) Peningkatan pendapatan skala juga dapat dilakukan dengan jalan menggali berbagai sumber permodalan yang mungkin diperoleh. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pada surat keputusan Gubernur tentang pedoman permodalan BKK, dimana sumber modal dapat berasal dari simpanan/tabungan masyarakat, dan dana penyertaan pihak ketiga termasuk bank komersial.

- function, rev. Of Econ. Stat., 47.
- Herrick, Bruce and Charles Kindleberger. 1984. Economic Development. Internasional Student Edition.
- Hopkin, John A., et al. 1973. Financial Management In agriculture. The interstate Printers and Publisher, in Denville Illinois.
- Johnston, J. 1984. Econometric Methods. Third Edition. International Student Edition McGraw-Hill International Book Company.
- King, R.A. 1980. The Frontier Production Function: A Tool For Improved Decision Making. Journal, Northest Agricultural Economics Council, Fall.

Daftar Pustaka

- Abbott, J. C. And Makeham, J. P. 1979. Agricultural Economics and Marketing in The Tropics. Intermediate Tropical Agricultural Series. Longman.
- Fare, R., L. Jansen, and C.A.K. Lovell. 1985. Modelling Scale Economies with Ray-Homothetic production